



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 9
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Kerja / Ke- 2
Dengan	: Menteri Agama RI
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Senin, 4 Juni 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019)
Hadir	: 1. orang dari 49 orang Anggota 2. Menteri Agama RI beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

- Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI dengan agenda membahas “**Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Kementerian Agama RI Tahun 2019**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Komisi VIII DPR RI dapat memahami pagu indikatif Kementerian Agama RI dalam RAPBN Tahun 2019 sebesar **Rp63.042.249.537.000,-** (*enam puluh tiga triliun empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*), yang akan dialokasikan untuk program:

No	Program	Pagu Indikatif 2019 (dalam ribuan rupiah)
1	Dukungan Manajemen	1.986.016.651
2	Kerukunan Umat Beragama	85.014.140
3	Pengawasan Akuntabilitas	153.527.316
4	Bimas Islam	5.157.191.274
5	Pendidikan Islam	49.525.396.710
6	Bimas Kristen	1.818.963.686
7	Bimas Katolik	929.931.792
8	Bimas Hindu	814.330.989
9	Bimas Buddha	262.931.222
10	Penyelenggaraan Haji & Umrah	1.496.621.215
11	Litbang dan Diklat	600.908.079
12	Jaminan Produk Halal	211.416.463
JUMLAH		63.042.249.537

2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu indikatif dan atas usulan tambahan anggaran Kementerian Agama RI sebesar **Rp6.702.179.596.000,-** (*enam triliun tujuh ratus dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2019 bersama Pejabat Eselon I Kementerian Agama RI.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI agar dalam penyusunan dan pengalokasian anggaran untuk RKA-K/L Kementerian Agama Tahun 2019 secara sungguh-sungguh menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Memprioritaskan penyelesaian permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai di lingkungan Kementerian Agama RI.
 - b. Memprioritaskan program untuk penyelesaian sertifikasi, *inpassing* serta selisih tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru dan dosen yang dialokasikan dalam usulan tambahan anggaran.
 - c. Memprioritaskan program bantuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan swasta di lingkungan Kementerian Agama.
 - d. Mendorong Kementerian Agama untuk menjadi pemeran utama melalui pendidikan dan bimbingan keagamaan dalam upaya pencegahan radikalisme.
 - e. Memastikan anggaran petugas haji dari *indirect cost* BPIH ke APBN Tahun 2019.
 - f. Mengupayakan pembangunan asrama haji di Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan provinsi lainnya yang belum memiliki asrama haji.
 - g. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama.
 - h. Mendukung peningkatan honor penyuluh agama Non-PNS dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pelayanan di bidang agama.
 - i. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sehingga dapat berperan efektif.
 - j. Melakukan kajian sebagai dasar usulan revisi Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Otonomi Daerah, khususnya terkait pengalokasian anggaran program fungsi agama dan fungsi pendidikan keagamaan.

- k. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terkait dengan fungsi dan substansi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.25 WIB

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

KETUA,

Ttd.

DR. H. M. ALI TAHER, SH., M.Hum.